



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**KPKNL**  
Palangkaraya

# LAPORAN KINERJA 2023



The page features a white background with a central blue-bordered box containing the title. There are three decorative elements: a solid blue circle on the left, a blue circle with diagonal stripes on the top right, and another blue circle with diagonal stripes on the bottom right.

**LAPORAN KINERJA  
KPKNL PALANGKA RAYA  
2023**

# Nilai - Nilai

## Kementerian Keuangan

### Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

### Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

### Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

### Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

### Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Palangka Raya .....	1
C. Peran Strategis KPKNL Palangka Raya .....	4
D. Sistematika Laporan .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	6
B. Pengukuran Kinerja .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
B. Kinerja Lainnya .....	15
C. Realisasi Anggaran .....	19
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Penutup .....	20
<b>LAMPIRAN</b>	

# PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis DJKN pada tingkat KPKNL Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja KPKNL Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat pengguna layanan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta nota dinas dari Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor ND-21/WKN.12/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023. Laporan Kinerja ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja KPKNL Palangkaraya secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perwujudan *good governance*.

Berdasarkan laporan capaian kinerja tahun 2023 KPKNL Palangka Raya mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), perubahan tersebut dikarenakan adanya Addendum Perjanjian Kinerja yang semula Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) menjadi 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palangka Raya sebesar 114,40%. NKO tersebut merupakan hasil perhitungan capaian IKU/Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three*, dengan rincian sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil tersebut merupakan capaian kinerja yang akan menjadi dasar untuk usul penetapan target dalam mengajukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 serta dasar pengambilan kebijakan atau langkah-langkah guna pencapaian target tahun berikutnya.

Kami harapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPKNL Palangka Raya tahun 2023 dan menjadi tolak ukur kegiatan di saat ini dan di masa depan. Kepada semua

pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Palangka Raya kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Palangka Raya, 24 Januari 2024  
**Kepala Kantor**



Ditandatangani secara elektronik  
**Fredy Himarwanto**



Laporan Kinerja KPKNL Palangka Raya Tahun 2023 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL selama tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palangka Raya Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Palangka Raya tahun 2022.

KPKNL Palangka Raya memperoleh pencapaian terhadap 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) IKU tahun 2023 sebesar 114,40%. Pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Bagan 1.**  
Rincian Capaian Kinerja KPKNL Palangka Raya

Stakeholder (30%)	Customer Perspective (20%)	Internal Process Perspective (25%)	Learning Growth & Perspective (25%)
✓ Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	✓ Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	✓ Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	✓ Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif
		✓ Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	✓ Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
		✓ Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	
		✓ Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	
		✓ Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	

Sebagai unit vertikal yang memberikan pelayanan, KPKNL akan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan terhadap pemangku kepentingan. Untuk itu, KPKNL Palangka Raya akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palangka Raya sebagai unit vertikal DJKN yang kondusif semakin meningkat.



# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALANGKA RAYA

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya merupakan kantor operasional yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan negara, penilaian, piutang negara, dan pelayanan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;

14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Susunan organisasi KPKNL Palangka Raya sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu :

**Diagram 1.1**

Struktur Organisasi KPKNL Palangka Raya

**STRUKTUR ORGANISASI KPKNL PALANGKA RAYA**



Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh sumber daya manusia yang ada pada KPKNL Palangka Raya yang berjumlah:

**Tabel 1.1**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SMA/SMK	-	1	3	-	4
DI	-	-	-	-	-
DIII	-	4	3	-	7
DIV/S1	-	-	8	1	9
S2	-	-	1	3	4
S3	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	-	5	15	4	24

**Tabel 1.2**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

KELOMPOK UMUR	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	-	4	-	-	4
31-40	-	-	4	-	4
41-50	-	1	5	3	9
Di atas 50	-	-	6	1	7
<b>JUMLAH</b>	-	5	15	4	24

**Tabel 1.3**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	4	1	-	5
Laki-laki	-	1	14	4	19
<b>JUMLAH</b>	-	5	15	4	24

**Tabel 1.4**

Komposisi Tenaga Fungsional

No	Fungsional	Jumlah
1	Jafung Pelelang	2
2	Juru Sita	4
3	Pemeriksa Piutang Negara	1
4	Jafung Penilai	3
5	Pranata Keuangan APBN	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

### C. PERAN STRATEGIS KPKNL PALANGKA RAYA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palangka Raya memiliki peran strategis sebagai berikut :

#### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Palangka Raya memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset *manager*, KPKNL Palangka Raya mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal, dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Palangka Raya sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Palangka Raya dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan, pemindahtanganan BMN, Pemanfaatan BMN, inventarisasi dan sertifikasi.

#### 2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil, penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Highest and Best Use*.

#### 3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta dan transport untuk kepentingan peralihan hak.

#### 4. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara merupakan pelayanan yang diberikan kepada instansi/badan/lembaga negara yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dinyatakan macet sehingga sulit tertagih setelah dilakukan upaya penagihan. Piutang

yang macet yang sulit tertagih tersebut dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang pengurusannya diselenggarakan oleh KPKNL sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sekaligus upaya penegakan hukum (*Law enforcement*) dalam masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Biaya Administrasi (biad) pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku. Selain itu, dari hasil pemanfaatan BMN juga termasuk dalam PNBP yang disetor oleh Kementerian/Lembaga yang asetnya dimanfaatkan.

#### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan ini, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

BAB I     Pendahuluan

BAB II    Perencanaan Kinerja

BAB III   Akuntabilitas Kinerja

BAB IV    Penutup

Lampiran

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan selama tahun 2023, KPKNL Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam BAB II Laporan ini. Dengan disusunnya LAKIN KPKNL Palangka Raya Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Palangka Raya di tahun yang akan datang.



# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Palangka Raya **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**.

Untuk merealisasikan tersebut, KPKNL Palangka Raya mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Palangka Raya adalah pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien serta birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

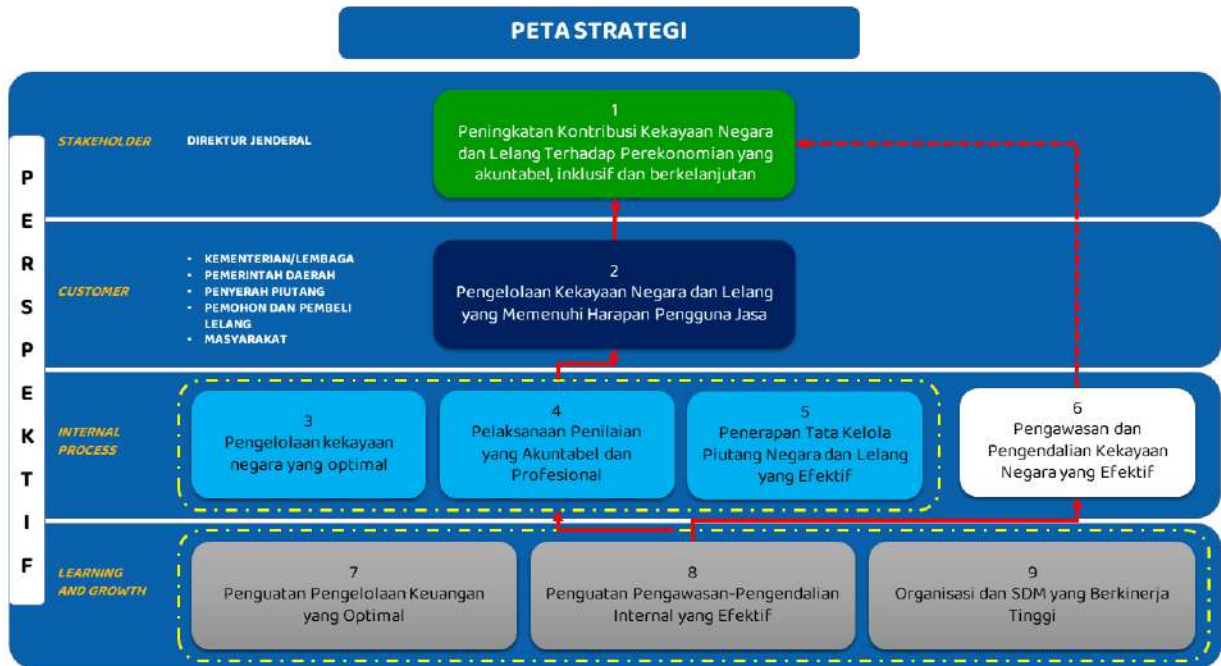
Pada dasarnya sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Sasaran yang hendak dicapai oleh KPKNL Palangka Raya adalah:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
8. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif;
9. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

Kesembilan sasaran yang hendak dicapai tersebut dapat tergambar dalam peta strategi KPKNL Palangka Raya tahun 2023 sebagai berikut:

**Bagan 2.1**

Peta Strategi 2023 KPKNL Palangka Raya



Peta Strategi KPKNL Palangka Raya menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholder perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sementara *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi KPKNL Tahun 2023 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis sebanyak 9 (sembilan) dan IKU yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Sasaran Strategis 1**

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

Indikato Kinerja		Satuan	Target
1.a	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	12,17
1.b	Persentase produktivitas lelang	%	80
1.c	Indeks integritas	Indek	88,67

**Sasaran Strategis 2**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Satuan	Target
2.a	Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	29,06
2.b	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	28,77

**Sasaran Strategis 3**

Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Indikator Kinerja		Satuan	Target
3.a	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	%	68
3.b	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	%	100
3.c	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100

**Sasaran Strategis 4**

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja		Satuan	Target
4.a	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	25
4.b	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Indek	70

**Sasaran Strategis 5**

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.a	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	%	15
5.b	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100

**Sasaran Strategis 6**

Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
6.a	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	%	86

**Sasaran Strategis 7**

Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Indikator Kinerja		Satuan	Target
7.a	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	%	100
7.b	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	100

**Sasaran Strategis 8**

Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
8.a	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Indek	60
8.b	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	Indek	100

**Sasaran Strategis 9**

Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Indikator Kinerja		Satuan	Target
9.a	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100
9.b	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	Indek	80

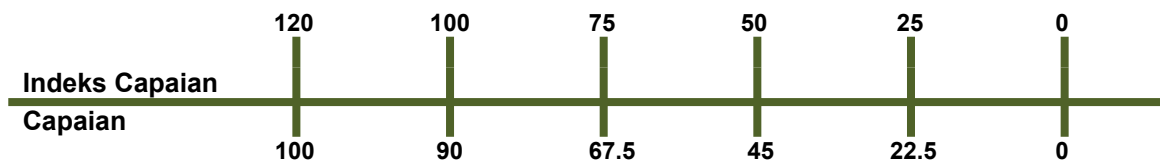
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Palangka Raya melaksanakan program yaitu:

Program/ Kegiatan Tahun 2023		Anggaran
<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp</b>	<b>277.356.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	4,720,000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp	272,636,000,00
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>3,796,619,000,00</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	15,398,000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3,768,659,000,00
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	1,120,000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	11,442,000,00

## B. PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun 2023, KPKNL berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximiza* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki *Stabilize*

$$C_{n+1} - C_n$$

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

$I_n$  = Indeks capaian  
 $I_{n-1}$  = Indeks capaian di bawahnya  
 $I_{n+1}$  = Indeks capaian di atasnya  
 $C_a$  = Capaian awal  
 $C_n$  = Realisasi/target x 100%  
 $C_n$  = Capaian dengan ketentuan:

- Apabila Realisasi > Target, maka:  
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$ , di mana  $C_a$  maksimum adalah 200%
- Apabila Realisasi < Target, maka:  
 $C_n = C_a$   
 $C_{n-1}$  = Capaian di bawahnya  
 $C_{n+1}$  = Capaian di atasnya

$$I = I + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_n - C_a} \quad (C \ C)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

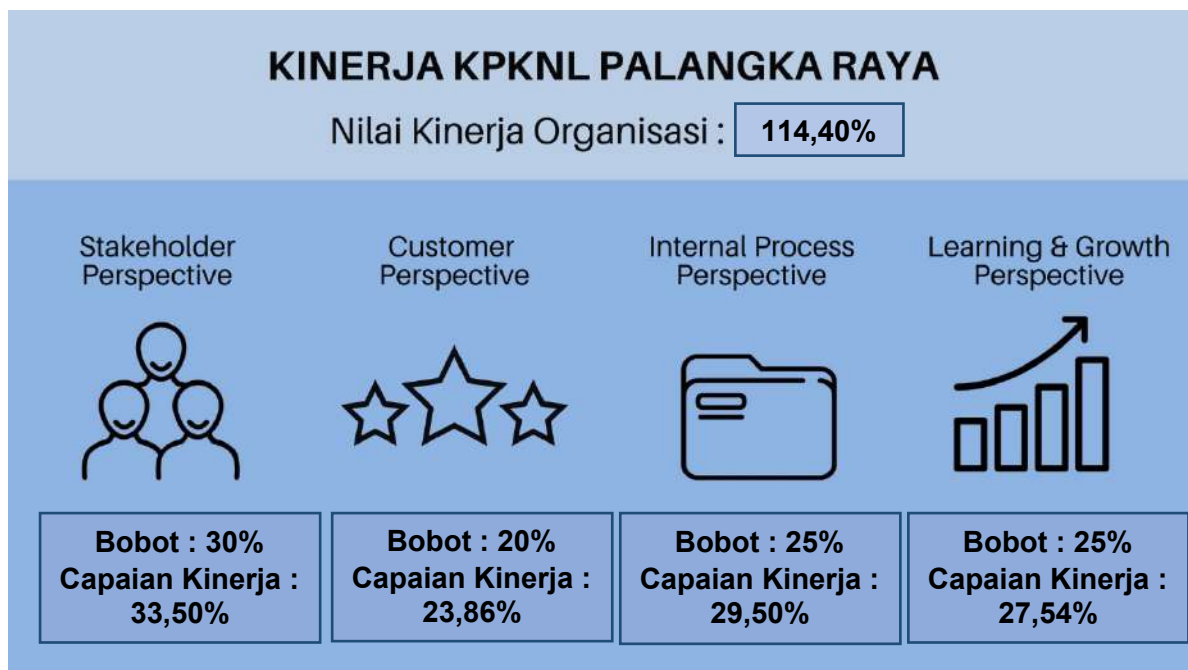
# **KINERJA**

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Palangka Raya tahun 2023 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan IKU. Pada tahun 2023, KPKNL Palangka Raya telah menetapkan 9 (Sembilan) sasaran strategis :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
8. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif;
9. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi:

Untuk mencapai 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2023 KPKNL Palangka Raya menetapkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 114,40%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing masing perspektif. Berikut penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis :



**Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan**

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

### **Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal**

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila :

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating);
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum);
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat;
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum;
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

### **Sasaran Strategis 4 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN..

### **Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

### **Sasaran Strategis 6 : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

### **Sasaran Strategis 7 : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal**

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

### **Sasaran Strategis 8 : Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi

### **Sasaran Strategis 9 : Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi**

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

## B. KINERJA LAINNYA

1. Penanganan Perkara  
Jumlah perkara/gugatan perdata di pengadilan yang ditangani oleh KPKNL pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara	Tahap Pengadilan
1	26/Pdt.G/2022/PN Kik	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
2.	112/Pdt.G/2022/PN Plk	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
3.	52/Pdt.G/2022/PN.Plk	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
4.	2/Pdt.G/2022/PN.Kik	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
5.	205/Pdt.G/2021/PN.Plk	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
6.	52/Pdt.G/2019/PN.Plk	Proses di Tingkat Mahkamah Agung
7.	8/Pdt.G/2023/PN Bnt	Selesai/Damai
8.	172/Pdt.G/2022/PN Plk	Selesai/Menang

2. Pelayanan Penilaian

Salah satu fungsi KPKNL Palangka Raya adalah melaksanakan pelayanan penilaian. Dalam rangka penilaian kekayaan negara, penilaian bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan aktual tentang jumlah dan nilai kekayaan negara. Pelaksanaan pelayanan penilaian tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Permohonan Penilaian	Jumlah Laporan
1	Pemindahtanganan BMN	65
2.	Pemanfaatan BMN	80
3.	Penilaian Barang Sitaan/Rampasan	66
4.	Pemindahtanganan BMD	18
5.	Lainnya (LKPP)	10

3. Penghargaan

Di tahun 2023, KPKNL berhasil mendapatkan beberapa penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah atas Capaian Pengurusan Piutang Negara Terbaik dan Penghargaan Produktifitas Lelang Tertinggi.
2. Piagam Apresiasi dari KPPN Palangka Raya atas Sinergi Optimal dalam Pengelolaan Keuangan Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang.
3. Piagam Peringkat I Kategori Penilaian IKPA Pagu kecil bobot IKPA Besar Tahun 2023 dari KPPN Palangka Raya.

4. Penghargaan dari Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atas Pemberdayaan UMKM menggunakan Portal Lelang Indonesia dalam rangka Perluasan Pemasaran Produk UMKM dan
5. Penghargaan dari Asosiasi Akumandiri DPD Kota Palangka Raya atas Dukungan dan Kolaborasi dalam Menggunakan Portal Lelang Indonesia sebagai Sarana Penjualan dan Perluasan Pemasaran Digital Produk UMKM Tahun 2023.

**Penghargaan Capaian Pengurusan Piutang Negara Terbaik  
Lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah**



**Penghargaan Capaian Produktivitas Lelang Tertinggi  
Lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah**



## Sinergi Optimal dalam Pengelolaan Keuangan Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang dari KPPN Palangka Raya



## Peringkat I Kategori Penilaian IKPA Pagu kecil bobot IKPA Besar Tahun 2023 dari KPPN Palangka Raya



**Penghargaan dari Asosiasi Akumandiri DPD Kota Palangka Raya**



### C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palangka Raya, pada tahun 2023 KPKNL Palangka Raya telah mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 4.079.714.000,00. Dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 3.774.522.107,00 atau 92,52% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu setelah revisi (Rp)	Realisasi Tahun 2023	
			Rp	%
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1.820.311.000	1.844.050.000	1.541.315.107	83.58%
3. Belanja Modal	2.253.664.000	2.235.664.000	2.233.207.000	99.89%
	4.073.975.000	4.079.714.000	3.774.522.107	92.52%

Pandemi Covid-19 memberi tekanan yang cukup tinggi pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fokus kepada 3 (tiga) pembiayaan yaitu kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tidak mampu dan pemberian dukungan bagi dunia usaha. KPKNL Palangka Raya berpartisipasi melakukan efisiensi dan realokasi anggaran dalam pemulihan ekonomi nasional.



# BAB IV

# PENUTUP

## A. PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Palangka Raya tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Palangka Raya dalam tahun anggaran 2023 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palangka Raya tahun 2023 telah ditetapkan sesuai dengan peta strategi Kemenkeu *Three* KPKNL yang terdiri 9 (sembilan) sasaran strategis, KPKNL Palangka Raya mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), perubahan tersebut dikarenakan adanya Addendum perjanjian kinerja yang semula Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) menjadi 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar 114,40%. IKU KPKNL Palangka Raya yang telah melampaui target yang ditetapkan adalah :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase produktivitas lelang
3. Indeks integritas
4. Persentase Realisasi Pokok Lelang
5. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
6. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan
7. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan
8. Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
9. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
10. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
11. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
12. Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
13. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
14. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
15. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
16. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif
17. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM
18. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
19. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Sedangkan IKU KPKNL Palangka Raya yang masuk dalam kategori kuning yaitu Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023 dan kondisi/permasalahan yang terjadi seluruh personel KPKNL Palangka Raya bertekad untuk meraih prestasi kinerja yang lebih baik dengan melaksanakan rencana kegiatan tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan optimal.

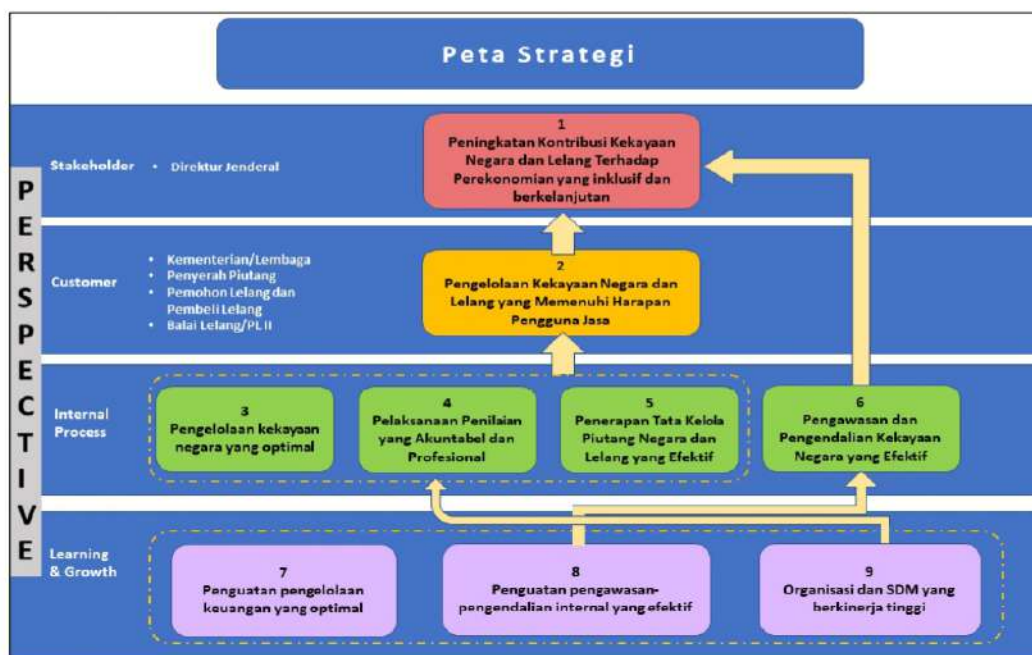


**LAMPIRAN**



**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-01/WKN.24/2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100
		3c-CP Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100
		3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	68
7	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	7a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5
		7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	61,25
8	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	8a-CP Indeks integritas	88,67
		8b-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
		8c-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		8d-N Persentase Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
		9b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80

Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp 277.356.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 4.720.000
2. Pengelolaan Aset	Rp 272.636.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 3,796,619,000</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 15.398.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3,768,659,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 1,120,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 11,442,000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ferdinan Lengkong

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
Robertus Belarminus Sigit Budi Prabowo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	80	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50	50	55	55	68	68
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							



Kode SS/KU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50		50	86	68
7	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	30	85	48,33	100	61,25
8	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
8a-CP	Indeks integritas						88,67	88,67
8b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100	100
8c-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60
8d-N	Persentase Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM						100	100
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Palangkaraya,



Utandatangani Secara Elektronik  
Robertus Belarminus Sigit Budi Prabowo



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan Q2: Laporan Kegiatan Monitoring Q3: Laporan Kegiatan Monitoring Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya



Diuraikan Secara Elektronik  
Robertus Belarminus Sigit Budi Prabowo



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Robertus Belarminus Sigit Budi Prabowo, S.E.	NAMA	Ferdinan Lengkonq	
NIP	196609141993031002	NIP	196612121991031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase produktivitas lelang	80	Penerima Layanan



	Selatan dan Tengah)			
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68	Proses Bisnis
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipkatkan	100	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	Proses Bisnis



8.	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	Proses Bisnis
10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
11.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	Proses Bisnis
12.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	68	Proses Bisnis
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran



	Selatan dan Tengah)			
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	61,25	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks integritas	88,67	Penerima Layanan
16.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	Penerima Layanan
17.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penerima Layanan
18.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penerima Layanan
19.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	(Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)			
20.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan

PERILAKU KERJA		
		upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik  
Robertus Belarminus Sigit Budi Prabowo  
196609141993031002

31 Januari 2023

Pejabat I



Ditandatangani secara elektronik  
Ferdinan Lengkong  
196612121991031001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	26 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
2	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	80	80
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
5	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		50	50	55	55	68	68
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100



7	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
12	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50			86	86
13	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
14	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
15	Indeks integritas						88,67	88,67
16	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100	100
17	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60
18	Persentase Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM						100	100
19	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100



20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Robertus Belaminus Sigit Budi Prabowo

196609141993031002

Ditandatangani secara elektronik

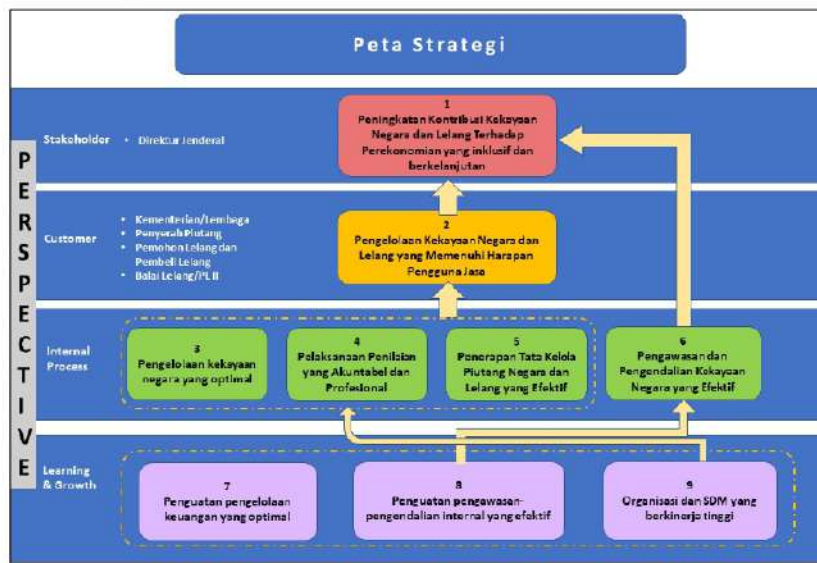
Ferdinan Lengkong

196612121991031001

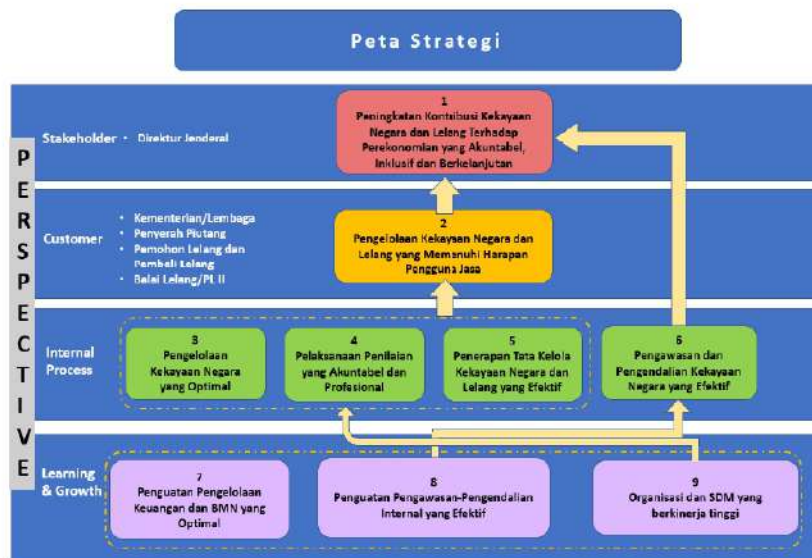
**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-01A/WKN.24/2023**

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-01/WKN.24/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Peta Strategis sebelum adendum:**



**Peta Strategis setelah adendum:**



a. **Perubahan Nama Sasaran Strategis**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<i>Stakeholder perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal					7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				

b. **Perubahan Nama IKU dan/atau Sub-IKU**

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

c. **Reposisi IKU/Sub-IKU antar Sasaran Strategis, Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU, dan Perubahan IKU Menjadi Sub-IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
8a-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
<i>Internal Process perspective</i>						<i>Internal Process perspective</i>					
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	5a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
<i>Internal Process perspective</i>						<i>Internal Process perspective</i>					
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif					7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
5a-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	7c-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

d. **Penghapusan IKU dan Sub-IKU**

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
8b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari PK KPKNL Palangka Raya

e. **Perubahan Trajectory Target IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

f. **Perubahan Kode IKU**

Kode IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
3d-CP	5a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
8c-N	8a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif
8d-N	8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Banjarbaru, 27 September 2023

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Palangka Raya,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani



Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	80%
		1c-CP Indeks Integritas	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%
		3c-CP Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	7a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
		7c-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	8a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
		8b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		9b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80

<b>Program/ Kegiatan Tahun 2023</b>		<b>Anggaran</b>
<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp</b>	<b>277.356.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	4,720,000
2. Pengelolaan Aset	Rp	272,636,000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>3,796,619,000</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	15,398,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3,768,659,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	1,120,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	11,442,000

Palangkaraya, 27 September 2023

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
Palangkaraya



Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani



Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto

**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang				60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang				80%	80%	80%	80%
1c-CP	Indeks integritas						88,67	88,67
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang				70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan				55%	55%	68%	68%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan				60%	60%	100%	100%
3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)				60%	60%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian				25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien				70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				75%	75%	100%	100%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara				-	50%	86%	86%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				100	100	100	100
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan				-	-	100%	100%
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
8a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						60	60
8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM						100	100
8c-N	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN				15%	15%	15%	15%
9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai				75%	75%	100%	100%
9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Palangkaraya,



gani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto

**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKARAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat			Q1 s.d. Q4	Tim Koin Mas 22/23	-
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
Palangkaraya



Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto

**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:  
16 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Fredy Himarwanto	NAMA	Kusumawardhani
NIP	197403161995031001	NIP	196908231996032001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk. I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palangkaraya	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif Dan Berkelanjutan. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	12,17%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan



		Indeks integritas	88,67	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	29,06%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	28,77%	Penerima Layanan
		Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
		Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Proses Bisnis
		Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	Proses Bisnis
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	Negara Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>				
1.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	Penguatan Internal atau Anggaran
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan.	Penyelesaian Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN 22/23	100	Penerima Layanan
<b>PERILAKU KERJA</b>				
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.		
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.		
5	Loyal			



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

16 Juni 2023  
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto  
197403161995031001

Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani  
196908231996032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:

16 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 25 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan					
No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%
2	Persentase produktivitas lelang	80%	80%	80%	80%
3	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%
6	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%
7	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	60%	60%	100%	100%
8	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	100%	100%
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70
11	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
12	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50%	86%	86%
13	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
14	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100	100
15	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
16	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif			60	60
17	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM			100	100
18	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko			80	80

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang Dinilai,

16 Juni 2023

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani Secara Elektronik  
Fredy Himarwanto  
197403161995031001

Ditandatangani Secara Elektronik  
Kusumawardhani  
196908231996032001

i.



Elektronik

02